



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

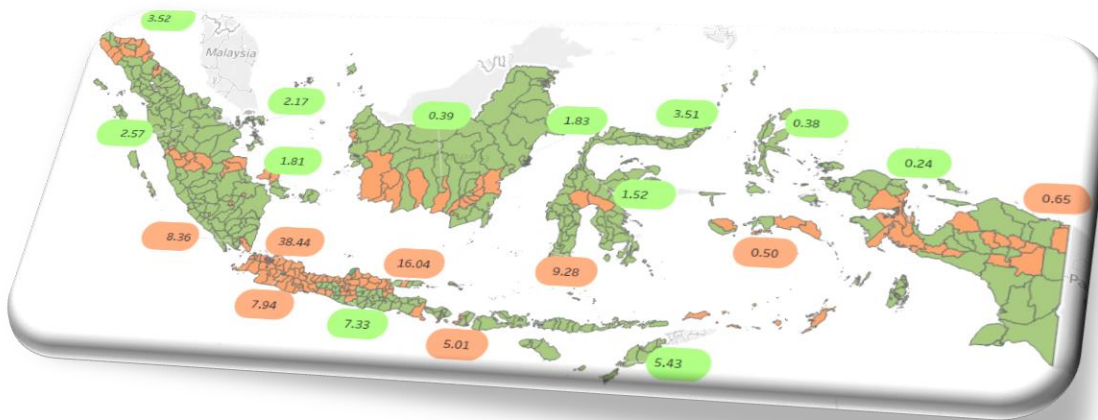
Periode 9 s.d. 20 November 2020



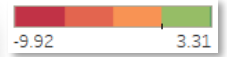
Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Subandono • Sugiyarto • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo 1
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

KINERJA PEREKONOMIAN

PERKEMBANGAN TINGKAT AKTIVITAS EKONOMI DI DAERAH



Delta Luminosity Index 14 Okt - 10 Nov

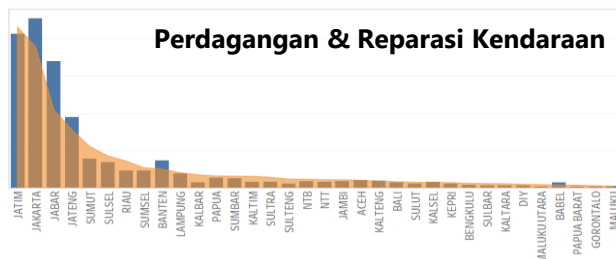
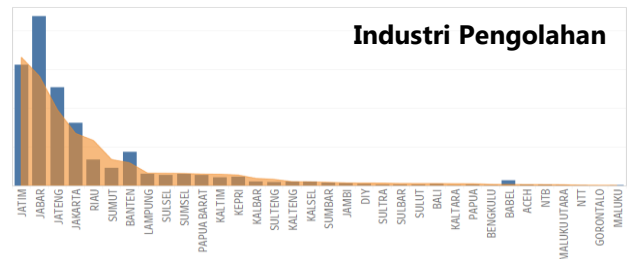
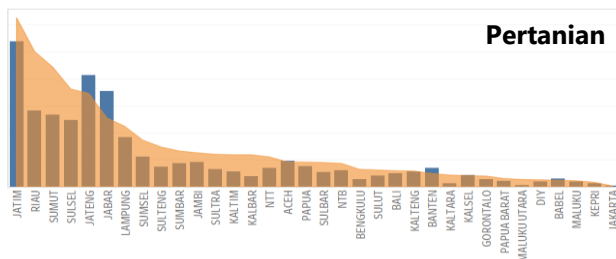


Luminosity Index 10 Nov

Index NAIK dari 14 Okt

Index TURUN dari 14 Okt

Berdasarkan nilai *luminosity index**, dalam 1 bulan terakhir, **aktivitas perekonomian pada sebagian besar wilayah mengalami peningkatan**, kecuali di Jakarta dan Jawa Barat. Ibu kota dengan **peningkatan** aktivitas ekonomi **tertinggi** adalah **Yogyakarta** (5,34 menjadi 7,33), **Samarinda** (0,93 menjadi 1,83), dan **Gorontalo** (2,67 menjadi 3,51). Namun demikian, terdapat ibu kota provinsi yang mengalami **penurunan** aktivitas ekonomi, **tertinggi** di **Bandung** (17,38 menjadi 7,94), **Jakarta** (47,04 menjadi 38,44), dan **Bandar Lampung** (12,48 menjadi 8,36).



Sektor yang mengalami **peningkatan** aktivitas adalah **Pertanian**, terutama di wilayah **Sumatera** dan **Sulawesi**. Sedangkan sektor **industri pengolahan** dan **perdagangan & reparasi kendaraan** cenderung mengalami **perlambatan** aktivitas, karena adanya perlambatan aktivitas di **Jawa**.

INDEKS MOBILITAS NASIONAL DAN DAERAH

NASIONAL - 6 November 2020

Top 3 & Bottom 3



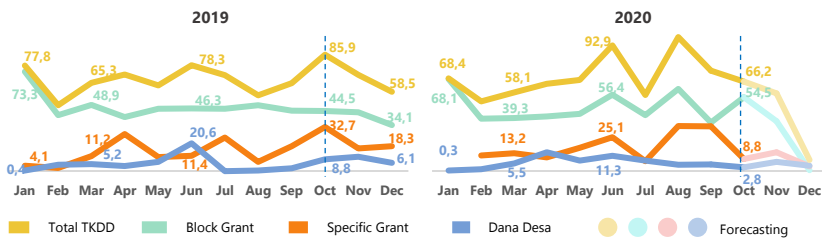
Berdasarkan nilai *mobility index** dalam 1 bulan terakhir, **aktivitas perekonomian mengalami peningkatan** (-0,073 ke -0,056). **Peningkatan tertinggi** terjadi di **Bali** (0,052 ke 0,117), **Sulawesi Tengah** (0,023 ke 0,070), dan **Papua Barat** (0,054 ke 0,095). Namun, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami **penurunan tingkat aktivitas ekonomi**, tertinggi di **Bangka Belitung** (0,071 ke 0,058), **Bengkulu** (0,106 ke 0,097), dan **Lampung** (0,079 ke 0,074).

*sumber: NASA dikutip Prospera, CSIS Indonesia

KINERJA FISKAL

PEMERINTAH PUSAT

TKDD Januari s.d. 13 November 2020 (YoY)
(dalam triliun rupiah)

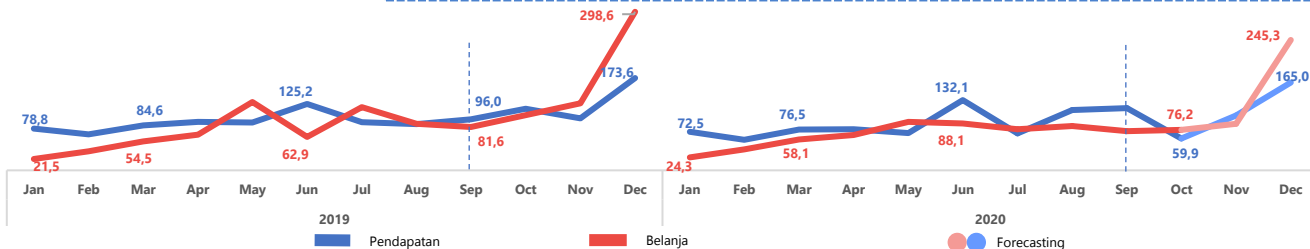


- Realisasi TKDD Rp701,2 T atau 91,8% dari pagu TKDD.
- Realisasi ini naik 1,8% dari periode yang sama th 2019 yang sebesar Rp689,2 T.
- BLT Desa telah disalurkan ke 74.186 desa sebesar Rp18,5 T kepada 8.002.345 KPM.
- Sampai akhir 2020, diperkirakan realisasi TKDD mencapai Rp763,5 T (99,9%).

PEMERINTAH DAERAH

APBD
Januari s.d. Oktober 2020 (YoY)
(dalam triliun rupiah)

- Realisasi Pendapatan turun 8,7% dari Rp926,9 T menjadi Rp846,4 T (YoY) dengan penurunan terbesar dari PAD.
- Realisasi Belanja turun 11,1% dari Rp763,4 T menjadi Rp678,4 T (YoY), karena turunnya seluruh jenis belanja, kecuali Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, dan paling besar Belanja Tak Terduga yang naik dari Rp0,6 T menjadi Rp22,7 T (YoY).
- Realisasi pembiayaan netto mengalami penurunan 26,7% dari Rp59,8 T menjadi Rp43,9 T (YoY) yang sumber utamanya dari penggunaan SILPA TA sebelumnya.



PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

- 2020 (Yellow), 2019 (Blue)
- Pajak Daerah**
131,9 (2020) vs 169,0 (2019)
- Peningkatan**
 - Pajak Rokok (+0,2%)
 - Pajak MBLB (+12%)
- Penurunan**
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (-20%)
 - Pajak Hotel (-54%)
 - Pajak Restoran (-39%)
 - Pajak Hiburan (-58%)
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (-20%)
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (-37%)

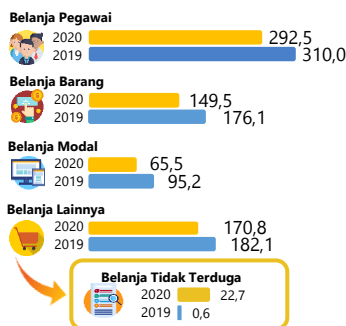
Retribusi Daerah

- 6,4 (2020) vs 7,4 (2019)
- Penurunan**
 - Retribusi Perizinan Tertentu (-4%)
 - Retribusi Jasa Umum (-9%)
 - Retribusi Jasa Usaha (-34%)

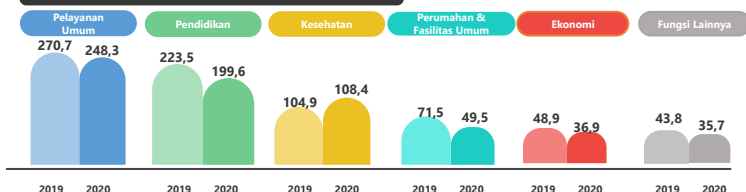
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 7,6 (2020) vs 7,3 (2019)
- Lain-lain PAD Yang Sah**
48,5 (2020) vs 44,5 (2019)

BELANJA DAERAH



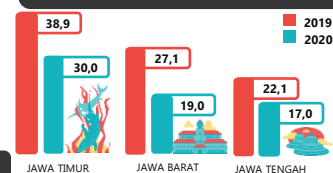
BELANJA BERDASARKAN FUNGSI



PEMBIAYAAN DAERAH



POSISI KAS DAERAH AGREGAT PROVINSI TERTINGGI



- Pembatasan aktivitas menyebabkan turunnya realisasi pajak konsumtif, seperti pajak hotel (-54%), pajak restoran (-39%), pajak hiburan (-58%), dan PBBKB (-20%).
- Realisasi belanja daerah masih bertumpu pada realisasi belanja pegawai dan barang/jasa sebesar 65,2% (Rp442,1 T).
- Realisasi Belanja Tak Terduga masih perlu diakselerasi, karena serapan belanja penanganan COVID-19 baru mencapai 43,2% dari total anggaran penanggulangan COVID-19.

KINERJA LAYANAN PENGLOLAAN LIMBAH

Sebaran Bank Sampah per Provinsi

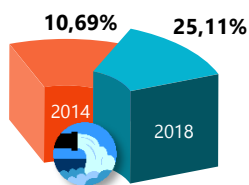


Jumlah Bank Sampah terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggi di Pulau Jawa.

▲ Sumber: Kementerian LHK dikutip oleh BPS, 2016

Persentase Desa dengan Pencemaran Air

Secara nasional, persentase desa yang tercemar sumber airnya mencapai 25,11% di tahun 2018, naik dari 10,69% di tahun 2014.



1 Tertinggi

- Prov. Kalimantan Tengah (98,49%)
- Prov. DKI Jakarta (89,36%)
- Prov. Kalimantan Barat (74,88%)

2 Terendah

- Prov. Nusa Tenggara Timur (3,78%)
- Prov. Papua (4,79%)
- Prov. Papua Barat (8,46%)

Persentase Sampah Terangkut

Kota dengan persentase sampah yang terangkut:

1 Tertinggi

- Kota Palembang (100,00%)
- Kota Tanjung Selor (100,00%)
- Kota Yogyakarta (99,24%)

2 Terendah

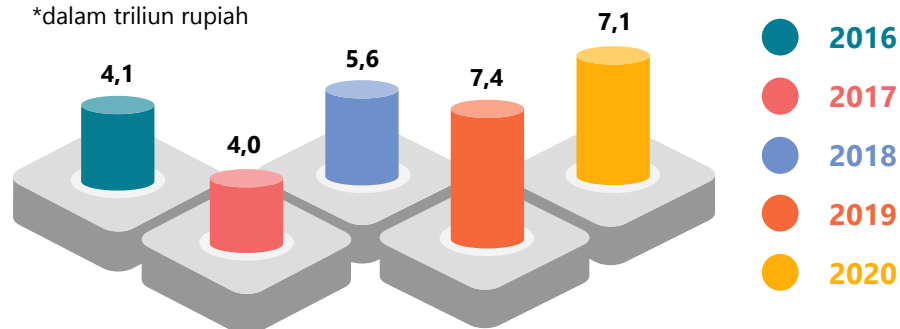
- Kota Jayapura (11,00%)
- Kota Manokwari (22,00%)
- Kota Samarinda (31,67%)

▲ Sumber: BPS, 2017

KINERJA LAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH

Anggaran terkait Limbah di APBD (Rp triliun)

*dalam triliun rupiah



Anggaran pengelolaan limbah pada APBD relatif mengalami peningkatan, dari sebesar Rp4,1 triliun di 2016 menjadi Rp7,1 triliun di 2020.

Anggaran Pengelolaan Limbah per Kapita (dalam Rupiah)

1 PROVINSI

Tertinggi

Prov. DKI Jakarta
62.684,7

Prov. Kalimantan Utara
7.925,1

Prov. D. I. Yogyakarta
6.531,3

Terendah

Prov. Jawa Tengah
51,0

Prov. Nusa Tenggara Timur
59,2

Prov. Jambi
77,6

2 KAB/KOTA

Tertinggi

Kab. Kepulauan Anambas
243.096,7

Kota Padang Panjang
224.616,4

Kota Sabang
196.339,8

Terendah

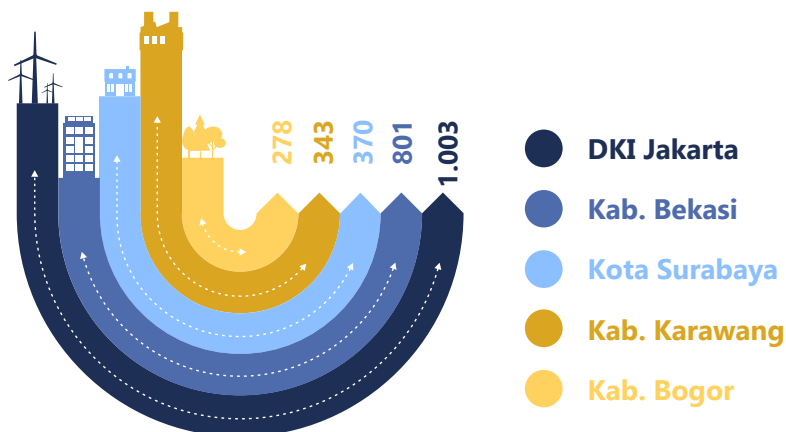
Kab. Tapanuli Selatan
570,9

Kab. Mesuji
1.045,7

Kab. Tasikmalaya
1.109,9

Jumlah Perusahaan sebagai Mitra Kerja yang Menangani Limbah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daerah dengan jumlah perusahaan sebagai mitra kerja pengelolaan limbah tertinggi adalah:



▲ Sumber: KLHK, 2020

EDITORIAL

Sinergitas Pengelolaan Limbah

Seiring dengan meningkatnya perekonomian, gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat, serta aktivitas usaha dan industri juga berubah dan cenderung meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban lingkungan akibat bertambahnya limbah. Pola konsumsi yang semakin beragam mempengaruhi komposisi material kandungan limbah menjadi semakin sulit diurai secara alami.

3 Faktor yang Berpengaruh pada Kualitas Limbah

- 1 Jumlah Penduduk**
Semakin banyak jumlah penduduk, meningkatkan limbah yang dihasilkan.
- 2 Keadaan Sosial Ekonomi**
Semakin tinggi kondisi ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita limbah yang dihasilkan. Kenaikan kesejahteraan meningkatkan kegiatan pembangunan, transportasi, pertanian, industri, sehingga menambah volume dan jenis sampah.
- 3 Kemajuan Teknologi**
Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas limbah, karena proses pabrikasi yang semakin beragam..

Limbah bersumber dari aktivitas industri maupun domestik (rumah tangga). Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, dan perniagaan. Limbah cair domestik yang berasal dari rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah air buangan yang berasal dari kakus (*black water*), dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik (*grey water*). Limbah yang berasal dari rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.

Dampak Limbah terhadap Kesehatan dan Lingkungan

Penanganan limbah masih dilakukan secara konvensional. Limbah dapat menyebabkan permasalahan kesehatan dan lingkungan, seperti Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) misalnya merkuri, timbal, memiliki sifat beracun, karsinogenik (menyebabkan kanker), dan mutagenik (menyebabkan cacat bawaan). Selain itu, dampak eksternalnya berupa degradasi lingkungan, terutama tanah, air dan udara di sekitar lokasi pemrosesan limbah.

Pengaruh limbah terhadap kesehatan

Efek langsung

efek karena kontak langsung dengan limbah tersebut, misalnya limbah beracun, limbah yang korosif terhadap tubuh, karsinogenik, teratogenik.

Efek tidak langsung

pengaruh tidak langsung ini dapat dirasakan akibat proses pembusukan, pembakaran, dan pembuangan limbah.

Kelembagaan Pengelolaan Limbah



Sistem pengelolaan limbah terpadu dinilai tepat dan dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan limbah. Penanganan limbah dari segi teknologi tidak akan tuntas hanya dengan menerapkan satu metode saja, tetapi harus dengan kombinasi dari berbagai metode melalui Sistem Pengelolaan Limbah Terpadu (SPLT) dengan pendekatan pengurangan sumber sampah, daur ulang dan guna ulang, pengkomposan, serta insinerasi dan pembuangan akhir.

Strategi pendanaan pengelolaan limbah

- 1 Pengembangan skema pendanaan terintegrasi: *creative financing*, dana transfer, KPBU, APBD.
- 2 Peningkatan kerjasama antar daerah dan antar tingkat pemerintahan, melalui model *public authority-public authority*, *public authority - non state entity*, atau model *multi partnerships*.
- 3 Program pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menggunakan sampah sebagaimana yang dilakukan Kota Bandung.

KABAR DAERAH

01 Kab. Bekasi mulai merancang pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Burangkeung yang berada di Kecamatan Setu. Inovasi itu disebabkan kondisi tempat pembuangan sampah milik pemerintah tersebut sudah dalam kondisi over kapasitas. Pemda berencana menerapkan teknologi pengelolaan persampahan dengan metode teknologi *Refuse Derived Fuel*. Sistem ini dapat mengubah sampah menjadi teknologi dalam industri semen maupun PLTU batu bara.
<https://metro.sindonews.com>



02 Kab. Musi Banyuasin terus berupaya menyeimbangkan pembangunan dengan lingkungan. Hal tersebut tercermin dalam skor kualitas hidup dan pengelolaan SDA yang tinggi dalam Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Tercatat, skor untuk elemen kualitas hidup Muba ialah 90,79 dan pengelolaan SDA 81,87. Di samping itu, Muba terus berinovasi dan memperbaiki kemudahan berusaha berbasis pembangunan hijau.
<https://katadata.co.id/>



03 Kota Solo mengusulkan agar dibuat pengolahan limbah di anak Sungai Bengawan Solo. Tujuannya, mengatasi pencemaran sungai yang terus terjadi, terutama saat musim kemarau. Pemkot Solo telah mengusulkan hal tersebut kepada Pemprov Jateng. Selain murah, hal tersebut juga tidak memerlukan lahan yang besar. Apabila rencana tersebut terwujud, air baku yang dihasilkan bisa lebih bagus dan tidak tercemar oleh limbah pabrik, jika dibandingkan dengan air baku yang di olah melalui Bengawan Solo yang cenderung tercemar limbah.
<https://www.merdeka.com/>



04 DKI Jakarta menggandeng PT Unilever Indonesia dan produsen semen PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) untuk mengolah sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terbarukan Bantargebang menjadi energi terbarukan. Dalam kolaborasi itu, pihak swasta mendukung kegiatan penambangan sampah pada zona tidak aktif di TPST Bantargebang. Sampah plastik diproses menjadi material yang dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar alternatif (*Refuse Derived Fuel/RDF*) pengganti batu bara di industri semen.
<https://megapolitan.kompas.com/>



05 Jabar mencanangkan Gerakan Aksi Nyata Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya di Bendungan Barugbug, Kab. Karawang. Status mutu Sungai Cilamaya adalah Tercemar Sedang akibat kerusakan lingkungan (perubahan tata guna lahan dan kerusakan lahan), limbah domestik (pencemaran limbah cair domestik dan penumpukan sampah), limbah industri (rendahnya oksigen terlarut), dan limbah peternakan (bangkai hewan dan limbah kotoran hewan). Dengan pencemaran itu, para peternak dan petani di sepanjang Sungai Cimalaya pun kesulitan mencari sumber air.
<http://dlh.jabarprov.go.id/>



06 Air minum di Batam terus teraliri air limbah domestik dari pemukiman, terutama pada Waduk Duriangkang. Perairan yang telah tercemar air limbah akan mengalami penurunan daya dukung lingkungan, sehingga menjadi tidak sehat dan berbau. Menanggulangi hal tersebut, Badan Pengusahaan Batam terus melakukan berbagai upaya mulai dari pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik, layanan penyedotan tinja, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja bergerak dan terus melakukan tindakan tegas untuk menangani aktivitas ilegal di daerah tangkapan air.
<https://kumparan.com/>



INOVASI DAERAH

Kota Bandung

Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Dari Hulu Ke Hilir di Kota Bandung

Persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika dan kenyamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan. **Pengelolaan sampah** dibagi dalam dua kegiatan utama, yaitu **pengurangan sampah** dan **penanganan sampah**. Dengan memperhatikan urgensi permasalahan yang ada, kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*), diubah dengan pendekatan **reduce at source, reuse** dan **resource recycle**. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. **Lima tahap penanganan** yaitu **pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah** dilakukan secara bertahap dan terencana berdasarkan kebijakan dan strategi dari Pemda masing-masing.

Kota Bandung, sebagai salah satu kota dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, tentunya tidak lepas dari persoalan terkait sampah. Menurut BPS, rata-rata produksi sampah per hari kota Bandung sebesar 1600 ton, dengan volume sampah yang terangkut sekitar 80,56% dari total produksi sampah. Dari sini terlihat bahwa persoalan terkait sampah bahkan sudah muncul sebelum ke tahapan akhir yaitu pengolahan dan pemrosesan.

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, Kota Bandung telah melakukan berbagai inovasi terkait kebijakan pengelolaan sampah. Langkah nyata ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran untuk **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** di dalam APBD Kota Bandung, dengan fokus kegiatan terkait dengan **penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, kerja sama pengelolaan persampahan, pengembangan teknologi persampahan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan**. Alokasi anggaran untuk program tersebut pada tahun 2019 sebesar Rp84,5 miliar atau meningkat 47,5% dari alokasi di tahun 2018.

Inovasi Pemda Kota Bandung

1 H2H (Hulu Hingga Hilir)

Pengelolaan sampah menggunakan pendekatan **H2H** dari hulu (**pengumpulan**) hingga hilir (**proses pengolahan akhir**), tidak lagi menggunakan T2T (dari TPS ke TPA), sehingga semua sampah di Kota Bandung akan dioptimalkan sebelum nantinya tiba di pengolahan akhir.



3 Bayar PBB pakai Sampah

Program pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menggunakan sampah melalui kerja sama antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan Bank Jabar Banten, dimana para nasabah mengumpulkan sampah ke bank sampah yang kemudian akan dihitung nilai (uang) ekonomisnya. Total nasabah bank sampah mencapai 9.689 orang, dengan total omset Rp2,95 miliar dan telah berhasil mengolah sampah organik sebanyak 1.692 ton.

2 Kang PISMAN (Kurangi, Pisahkan, & Manfaatkan)

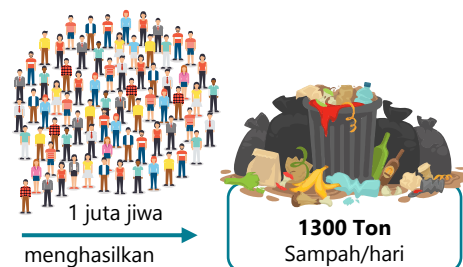
Program "Kang Pisman" merupakan program mengubah pola pikir *food waste* (setiap makanan hanya akan menjadi sampah) menjadi *waste to food* (mengubah sisa makanan menjadi makanan kembali). Sejak program tersebut digulirkan, dari 1.800 RW, saat ini 147 RW sudah tidak membuang sampah ke TPS, 143 RW merupakan Kawasan Bebas Sampah (KBS), dan 467 RW sudah memiliki bank sampah.

Berbagai Inovasi yang telah dilakukan Pemkot Bandung tersebut, mendapat penghargaan piagam kinerja pengurangan sampah dari KLHK, serta memperoleh *reward* Dana Insentif Daerah kelompok kategori pengelolaan sampah.

KAJIAN PILIHAN

Model Public-Public Partnerships sebagai Embrio Pelaksanaan Skema Pendanaan Terintegrasi: Studi Kasus PLTSa Benowo Surabaya

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang menimbulkan *a double edged sword* bagi suatu negara. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk akan mendukung pula pertumbuhan ekonomi, karena akan meningkatkan konsumsi dan produktivitas. Namun, pertumbuhan penduduk juga berpotensi memberikan dampak negatif jika tidak terkelola dengan baik, seperti permasalahan sampah. Dengan asumsi **setiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah per hari**, maka timbunan sampah akan mencapai 64 juta ton per tahun (KLHK, 2019). Untuk kota besar yang penduduknya berjumlah 1 juta jiwa ke atas, maka sampah yang dihasilkan dapat mencapai 1300 ton per hari, dan sampah plastik dapat mencapai 15%. Salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dukungan pendanaan guna pembangunan infrastruktur *waste management*. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah melalui skema pendanaan terintegrasi. Mengingat skema ini belum banyak diaplikasikan, maka studi ini bermaksud untuk menjawab bagaimana skema pendanaan terintegrasi dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah di daerah.



Kajian ini menggunakan pendekatan teori **Critical Systems Hermeneutics (CSH)** untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sampah melalui *qualitative approach* dengan desain studi kasus. Kasus yang dipilih adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo di Kota Surabaya. Adapun data yang digunakan adalah data primer seperti dokumen literatur dan dokumen kebijakan, beserta dokumen sekunder, antara lain data APBD.

Volume sampah yang besar sebagai akibat ledakan jumlah penduduk dapat dipandang sebagai suatu sumberdaya 'input' untuk membangun industri pengelolaan sampah dalam menghasilkan produk berbasis sampah seperti pupuk dan listrik. Bagaimana skema pendanaan terintegrasi (*Integrated Funding/IF*) diterapkan dalam pembangunan PLTSa Benowo di Surabaya?

1 The Source of Power

Pertama, Pendekatan CSH dalam bagian "*The Source of Power*" dianalisis bahwa kolaborasi antar level pemerintahan diwujudkan dalam Pendanaan Terintegrasi pada pengelolaan input ini. Integrasi tersebut dilakukan dengan pendekatan integrasi kegiatan, dimana kegiatan pembangunan PLTSa yang didanai dengan APBD mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN dalam bentuk dana transfer, yaitu adanya dukungan DAK Non Fisik yang digunakan sebagai Biaya Layanan Pengelolaan Sampah sebesar Rp 500.000 per ton sampah. Dana itu dialokasikan sebagai insentif kepada daerah yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan PLTSa.

2 Measurement

Kedua, Pendekatan CSH dalam bagian *measurement* yaitu indikator keberhasilan dari pengelolaan industri berbasis sampah yang dikenal dengan nama *The Triple Bottom Line: People, Planet, Profit*. Selain bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat (*People*), menjaga pelestarian lingkungan dan menjaga kualitas air, tanah dan udara (*Planet*), industri pengelolaan sampah juga dapat dilaksanakan secara profesional untuk tujuan menambah PAD (*profit*). Dalam konteks PLTSa Benowo, kerjasama antar institusi publik dilakukan antara Pusat dan Pemda dalam bentuk pendanaan terintegrasi pengelolaan input, dapat dilanjutkan dengan kerjasama pengelolaan output yaitu listrik yang dihasilkan. Kerjasama dalam bentuk *public authority-public authority* dalam skema *Public – Public Partnerships (PuPs)* dapat dilakukan antara BUMD pengelola PLTSa (sebagai wakil Pemda) dengan PLN (sebagai wakil Pusat) yang akan membeli dan memasarkan listrik tersebut kepada masyarakat, sebagaimana amanat dari Perpres 38 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

KAJIAN PILIHAN

Model Public-Public Partnerships sebagai Embrio Pelaksanaan Skema Pendanaan Terintegrasi: Studi Kasus PLTSa Benowo Surabaya

Temuan tersebut memberikan gambaran bagi pemerintah dalam mengembangkan skema pendanaan terintegrasi ke depan. *Tipology public authority-public authority* dalam pengelolaan sampah di kota Surabaya dapat menjadi embrio implementasi skema IF. Selanjutnya, dengan pendekatan PuPs ini beberapa model implementasi IF dapat dikembangkan seperti model kerjasama public authority – non state entity, atau model multi partnerships. Model tersebut dapat pula dikembangkan tidak hanya di sektor pengelolaan sampah, namun juga dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan air minum. Hal ini menggambarkan bahwa kedepan, selain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, untuk mengembangkan skema pendanaan terintegrasi pemerintah perlu terus mendorong hubungan keuangan antar daerah yang didalamnya termasuk kerjasama antar daerah.

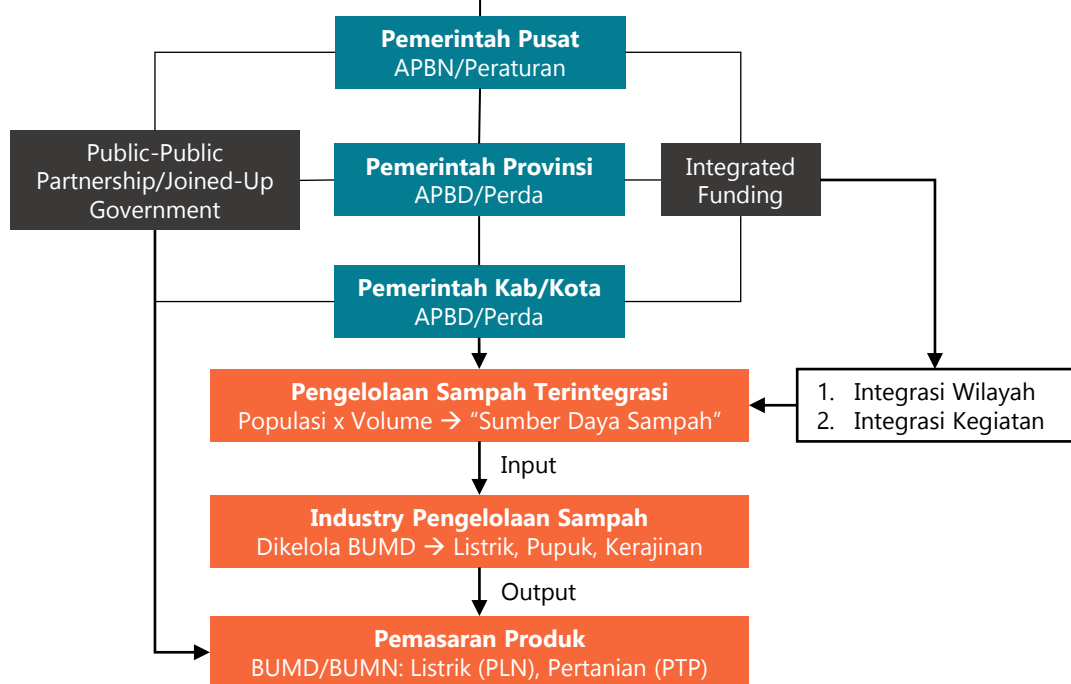
Kerangka Hubungan CSH, IF dan PuPs

PENGELOLAAN SAMPAH

1 Source of Motivation

Beneficiaries : Masyarakat
Purpose : Kebersihan, Kesehatan, Pelestarian, Lingkungan
Target : People, Planet, Profit (3Ps)

2 Source of Power



Penulis: Radies K., Jackwin S., dan Eko A.